

BAB III

PROGRAM FORCLIME UNTUK MENGATASI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI 3 KABUPATEN KALIMANTAN

Munculnya permasalahan lingkungan yang menjadi tiga isu pokok bahasan teratas dunia mendorong semua pihak untuk turut mengatasi permasalahan tersebut. Tidak terkecuali dengan negara Jerman dan Indonesia yang terdorong untuk melakukan kerja sama. Perundingan kedua negara yang menghasilkan kerja sama berujung dengan terciptanya program FORCLIME. FORCLIME merupakan salah satu langkah Jerman dan Indonesia untuk turut mengatasi permasalahan lingkungan bersama dengan pihak lainnya dengan berangkat dari sektor kehutanan. Bab ini akan membahas tentang profil FORCLIME dan cara kerjanya.

A. Cara Kerja Program FORCLIME

Saat permasalahan lingkungan yang sedang bergulir Jerman dan Indonesia memutuskan untuk bekerja sama dalam mengatasi hal tersebut. Indonesia yang merupakan negara salah satu negara pemilik hutan terluas di dunia dengan luas hutan tropis yang dimiliki Indonesia terdapat kekayaan sumberdaya hutan dengan persediaan kayu beserta keanekaragaman hayati di dalamnya. Selama ini Indonesia memafaatkan dan mengandalkan hidup dengan memanfaatkan hasil hutan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara pemilik hutan terbesar di dunia dengan luas hutan lebih dari 130 juta ha atau 70 persen dari luas daratannya. Sebagai negara berkembang, pemerintah sangat bergantung pada sektor kehutanan maupun sektor yang terkait dengan kehutanan seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan untuk pembangunan nasional. Kegiatan pemanfaatan hutan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun negara yang berlebih tanpa melakukan kegiatan untuk penanggulangan dari efek yang akan ditimbulkan di masa mendatang menyebabkan munculnya

permasalahan lingkungan yang cukup serius yaitu adalah deforestasi dan degradasi hutan.⁶⁵

Berkurangnya luas tutupan hutan dikarenakan laju deforestasi yang tinggi menyebabkan tidak maksimalnya fungsi hutan Indonesia dan berdampak salah satunya pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 1950 Indonesia masih memiliki hutan yang lebat. Sekitar 40 persen dari luas hutan pada tahun 1950 ini telah ditebang dalam waktu 50 tahun berikutnya. Jika dibulatkan, tutupan hutan di Indonesia turun dari 162 juta ha menjadi 98 juta ha.⁶⁶

Laju deforestasi yang cepat di Indonesia, menyebabkan luas tutupan hutan semakin berkurang dan membawa akibat yang tidak sederhana. Indonesia menempati peringkat ke-14 negar-negara penghasil emisi karbon (gas rumah kaca/GRK) tertinggi di dunia berdasarkan sebuah laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) di tahun 2008. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa di sektor kehutanan, emisi karbon dilepaskan sebagai akibat deforestasi mencapai 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya diakibatkan degradasi hutan.⁶⁷

Indonesia yang merupakan salah satu pemilih wilayah hutan terbesar di dunia dengan adanya laju deforestasi dan degradasi yang tinggi membuat Indonesia harus berkonsentrasi segera menyelesaikan permasalahan dalam negeri tersebut. Keseriusan Indonesia untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan adalah dengan keputusan Indonesia untuk mengimplementasi skema REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) yang mana REDD merupakan skema yang terfokus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Skema ini telah disepakati oleh Para Pihak dan merupakan hasil dari perundingan COP-13 yang diadakan di Bali, Indonesia. Komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan skema ini tampak

⁶⁵ Giorgio Budi Indrarto dkk, op. cit. Hlm 1.

⁶⁶ FWI/GFW, op. cit. Hlm viiii.

⁶⁷ FWI. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*. op. cit. Hlm 1.

jasas dengan pernyataan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di dunia internasional, yang menyatakan bahwa Indonesia akan mengurangi emisi gas rumah kacanya sebesar 26 persen dari laju emisi bisnis seperti biasa pada tahun 2020 dengan biaya sendiri, atau sebesar 41 persen dengan bantuan internasional. Skema yang telah disepakati, pernyataan tercantum sebesar 41 persen upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kacanya dibantu oleh bantuan internasional membuka peluang untuk negara lain yang ingin menjadi mitra dan melakukan kerja sama dengan Indonesia.⁶⁸

Memanfaatkan peluang yang terbuka luas untuk menjadi mitra, Jerman menjalin kerja sama dengan Indonesia untuk di bawah REDD dengan menciptakan program yang mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Kedua negara bermitra dan membentuk Program Hutan dan Perubahan iklim yaitu *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME). FORCLIME merupakan program kerja sama yang tercipta antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman yaitu memberikan kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang berangkat dari sekor kehutanan. Kerja sama ini terjalin dengan Kementrian Kehutanan dan Perhimpunan Jerman untuk Kerja Sama Internasional (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ*) menjadi ujung tombaknya kerja sama Indonesia dan Jerman. GIZ merupakan badan milik Pemerintah Jerman yang memiliki salah satu fokus area pada *energy and climate change*. Kerja sama antara kedua negara ini bermitra dengan Bank Pembangunan Jerman (KfW) dalam menjalankan program FORCLIME ini. KfW merupakan Bank Pembangunan Jerman yang mewakili Pemerintah Jerman melaksanakan proyek-proyek kerja sama dengan negara-negara berkembang dan baru berkembang.⁶⁹

Tujuan program FORCLIME adalah tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan

⁶⁸ Giorgio Budi Indrarto dkk, Loc. Cit.

⁶⁹ FORCLIME, *Menggabungkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengurangan Emisi*. op. cit.

secara lestari, rehabilitasi hutan, perlindungan dan konservasi hutan. Salah satu program FORCLIME lokasi Kegiatan Percontohan (*Demonstration Activites*) terdapat pada Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara, Kabupaten Berau di Kalimantan Timur dan Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Program FORCLIME dimulai sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2020. Selama program berlangsung FORCLIME memiliki target tujuan menurunnya emisi karbon sebesar 300.000 sampai dengan 400.000 ton e CO₂ per lokasi *Demonstration Activities* pada akhir periode di tahun 2020.⁷⁰

Sejalan dengan usaha megurangi emisi gas rumah kaca dunia yang berangkat dari sektor kehutanan pada saat yang sama program ini ingin meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar area hutan Kalimantan, sehingga dengan terjaganya kelestarian hutan, maka hutan dapat melakukan fungsinya secara maksimal baik dalam penyerapan karbon dan menyediakan barang bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan program ini FORCLIME bekerja sama dengan pemerintahan dan juga terbuka dengan mengajak LSM dan sektor swasta lain untuk bermitra mengatasi permasalahan dan turut menjaga kelestarian hutan di tiga kabupaten di Kalimantan bersama.

FORCLIME dalam mencapai tujuan tersebut memadukan kerja sama teknis dan keuangan melalui pendekatan berbagai tingkatan, sementara Modul Kerja Sama Teknis atau Modul TC (*Technical Cooperation*) fokus pada reformasi administrasi kehutanan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di berbagai tingkatan, sedangkan Modul Kerja Sama Keuangan mendukung kegiatan percontohan REDD di tiga kabupaten di Kalimantan.

⁷⁰Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Triwulan I 2017*. Diakses pada <https://www.bappenas.go.id/files/lkphln/2017/TW%20I/Buku%20I%20LK-P-PHLN%20TW%20I%20Tahun%202017-.pdf>, tanggal 11 Maret 2018. Hlm 16.

Modul kerja sama teknis FORCLIME bekerja melalui lima Bidang Strategis (*Strategic Area – SA*) untuk mencapai dampak yang diinginkan:

1. SA1: Kebijakan kehutanan, perencanaan strategis dan pengembangan kelembagaan

Pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, FORCLIME memberikan saran kebijakan dan membantu dalam pengembangan strategi untuk mengarahkan strategi sektor hutan dan rencana jangka panjang menengah terhadap persyaratan pengurangan emisi gas rumah kaca, tata kelola kehutanan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, FORCLIME mendukung Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan kerangka peraturan bagi pengelolaan hutan lestari melalui reformasi administratif termasuk pembangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dukungan penting lainnya ditujukan untuk persiapan pelaksanaan mekanisme REDD+ di masa depan. Program ini bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dalam menyiapkan regulasi dan lembaga-lembaga yang diperlukan, bersama-sama dengan mitra program pembangunan lainnya.

2. SA2: Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

FORCLIME mendukung pembangunan dan pengembangan KPH di Indonesia pada tingkat nasional dan tingkat daerah. Dukungan di tingkat nasional meliputi pengembangan kebijakan yang relevan dengan pembangunan KPH serta peningkatan kapasitas secara umum. sementara pada tingkat daerah FORCLIME mendukung implementasi perancangan, perencanaan hingga pengelolaan KPH. Oleh karena itu, FORCLIME mendukung pembangunan KPH Model di Kabupaten Berau (Provinsi Kalimantan Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu (Provinsi Kalimantan Barat) dan Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Utara).

3. SA3: Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

FORCLIME mendukung perusahaan kehutanan swasta dalam proses sertifikasi FSC dan dalam mengintegrasikan kepentingan masyarakat hutan yang lebih baik ke dalam proses ini, selain itu, FORCLIME juga mendukung untuk menganalisis dampak dari pengelolaan hutan lestari pada pengurangan emisi.

4. SA4: Integrasi konservasi dan pembangunan (Ekonomi Hijau)

FORCLIME membantu pemahaman konsep Ekonomi Hijau di antara para pihak yang relevan. Pengarusutamaan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan penghidupan berkelanjutan masyarakat di dalam dan sekitar hutan merupakan kegiatan utama. Sebagai contoh, FORCLIME mendukung pengembangan kapasitas *local* nilai pemasaran dan strategi investasi. Selanjutnya, sistem monitoring dan evaluasi akan dirancang untuk mengukur secara efektif dampak ekonomi hijau di berbagai tingkatan.

5. SA5: Pengembangan Sumber Daya Manusia

FORCLIME menyediakan dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengurangan emisi di sektor kehutanan. Pendampingan program FORCLIME diarahkan pada: (1) Pengembangan kebijakan terkait dengan kapasitas sumber daya manusia kehutanan; (2) Penguatan kapasitas manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan pemerintah (khususnya Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan – Pusdiklat Kehutanan – di Bogor); dan (3) Pengembangan pelatihan terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan mitigasi Perubahan iklim sektor kehutanan.

6. SA6: Keragaman Hayati dan Pengelolaan Kawasan Lindung

FORCLIME menyediakan bantuan teknis dalam bidang keragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung pada tingkat nasional dan tingkat daerah dalam upaya untuk mendukung pengelolaan hutan lestari yang berkontribusi pada manfaat dan kesejahteraan masyarakat seraya mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan di Indonesia. Bantuan FORCLIME fokus pada: (1) Perbaikan kebijakan terkait dengan konservasi keragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung; (2) Penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan lindung dalam kerangka kesatuan pengelolaan hutan; dan (3) Promosi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola konservasi keragaman hayati dan manajemen kawasan lindung.⁷¹

Berjalannya program FORCLIME diperlukan juga Modul Kerja Sama Keuangan. Pendanaan KfW untuk Modul Kerja Sama Keuangan atau Modul FC (*Financial Cooperation*) sebesar EUR 20 juta akan dibiayai secara bersama dengan 10 persen kontribusi dari Pemerintah Indonesia. Dana untuk proyek ini dibayarkan kepada kementerian keuangan pemerintah pusat dan dicairkan ke daerah melalui APBN. Badan pelaksana proyek adalah Kementerian Kehutanan (MoF), yang bertanggung jawab atas koordinasi dan manajemen Modul FC, termasuk melapor ke Kementerian Keuangan. MoF/NPMU akan berkoordinasi secara erat dengan Modul TC. Direktorat kehutanan dan konservasi sumber daya air di Bappenas akan mengkoordinir pemantauan pelaksanaan Modul FC. Implementasi Modul FC didukung oleh seorang konsultan, yang direkrut oleh MoF dengan persetujuan KfW, yang mendukung seluruh

⁷¹ FORCLIME, *Menggabungkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengurangan Emisi*, op. cit

aspek program dan mempunyai tanggung jawab khusus untuk mengawasi seleksi lokasi-lokasi DA.⁷²

Program FORCLIME tercipta di bawah REDD yang diimplementasi Indonesia, dengan skema REDD yang terus berkembang seiring dengan terus berlanjutnya COP menjadi REDD+ dengan tambahan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan ketika melakukan upaya mengurangi laju deforestasi dan FORCLIME tetap terus berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menekan laju deforestasi yang mana pemanfaatan isi hutan merupakan pemasukan dari masyarakat sekitar hutan sesuai dengan modul kerja sama teknis yang telah tertulis.

B. Hasil FORCLIME di Kalimantan

Berjalannya program kerja sama antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia, FORCLIME sejak tahun 2010 hingga 2016 dengan tujuan utama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menekan laju deforestasi dan degradasi hutan dan tetap dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam maupun di luar hutan membawa perubahan ke arah yang positif melalui berbagai upaya yang telah dijalankan FORCLIME.

FORCLIME membantu meningkatkan komunikasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, dengan komunikasi yang meningkat ini mempercepat beroperasinya KPH. FORCLIME mendukung upaya pemerintah pusat untuk memperbaiki kebijakan dan kerangka kerja peraturan yang diperlukan dan memastikan desentralisasi pengelolaan sumber daya yang efektif. Di tingkat kabupaten, FORCLIME mendukung pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diusulkan pada tahun 2010 sebagai satuan operasional yang efektif.

⁷²HuMa, *Studi Pendahuluan aras Kebijakan Safeguards Donor-Donor Bilateral terhadap Program REDD di Indonesia*. Jakarta: Huma, 2010. Hlm 71.

Dukungan ini fokus pada pembentukan KPH model di Kabupaten Malinau dan Berau di Kalimantan Timur dan Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. FORCLIME mendukung pembentukan KPH dengan memfasilitasi pengembangan KPH sejak dari konsep hingga menjadi tahap pelaksanaannya, termasuk pembiayaannya dibantu turut oleh FORCLIME. Selain membiayai pembentukan KPH, FORCLIME mendukung pelaksanaan pertemuan penting untuk koordinasi KPH yang tidak dibiayai oleh APBN dan kegiatan sosialisasi di beberapa dan beberapa kecamatan memberi bantuan biaya untuk kegiatan sosialisasi di beberapa desa dan beberapa kecamatan. Dukungan FORCLIME sangat penting untuk penguatan kapasitas, peningkatan pengetahuan.⁷³

Dalam mencapai tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menekan laju deforestasi FORCLIME juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. FORCLIME membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan tentang konsep Ekonomi Hijau untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan tetap menjaga lingkungan. FORCLIME mendukung pengembangan kapasitas nilai ekonomi lokal Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), GIZ di bawah FORCLIME membantu untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan menunjukkan hasil hutan bukan hanya kayu dapat meningkatkan kesejahteraan dengan cara yang lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya lain. Gerak masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan untuk mencapai akses pendidikan dan informasi yang terbatas menyebabkan tidak adanya pengetahuan yang masuk sehingga pengimplementasian REDD+ hingga terciptanya program FORCLIME membantu mengubah cara pandang dan pola pikir dapat memotivasi masyarakat untuk dapat

⁷³FORCLIME, *Mendukung Kesatuan Pengelolaan Hutan di Tingkat Kabupaten*. Diakses pada

https://www.forclime.org/documents/Briefing%20Note/Bahasa/BR%20%20-%20FMU_Ind.pdf tanggal 6 Januari 2018.

memanfaatkan sumber daya dan sekaligus dapat menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati hutan secara baik.⁷⁴

Sebagai salah satu bentuk FORCLIME dalam mengubah cara pandang masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan dapat mengelola sumber daya dengan baik FORCLIME memberikan pelatihan dengan salah satu temanya yaitu madu. FORCLIME memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pembinaan budi daya dan praktik pemanenan madu dari hutan secara lestari yang mana memanen madu hanya mengambil madu tanpa merusak keberlanjutan kehidupan lebah untuk tujuan pelestarian. Adanya pembinaan ini membawa perubahan perubahan sikap dan pola pikir yang kepada masyarakat. Sebelumnya masyarakat mengambil madu secara tradisional tanpa adanya pemahaman untuk melestarikan kini menjadi lebih waspada dengan pelestariannya. Perubahan sikap dan pola pikir masyarakat tersebut menghasilkan peningkatan hasil produksi madu seperti yang terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.⁷⁵

Bentuk lain FORCLIME dalam meningkatkan meningkatkan kehidupan berkelanjutan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, GIZ di bawah program FORCLIME membantu dengan memfasilitasi petani untuk mendapatkan edukasi. Seperti perwakilan petani di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada bulan November 2014 untuk memulai menanam kakao diberikan fasilitas mempelajari cara budidaya pada Pusat Penelitian kakao di Jember dan Bali hal tersebut juga ditujukan supaya ilmu tersebut dapat dipraktikan dan diajarkan kepada petani-petani Kapuas Hulu lainnya. Di bawah FORCLIME, GIZ memberikan dampingan kepada para petani Kapuas Hulu untuk penanaman kakao mulai pada bulan Desember 2014 dengan mendatangkan bibit unggul kakao dari Jember. Penanaman bibit tersebut dimulai pada bulan Februari hingga Maret 2015. Dalam kegiatannya untuk meningkatkan kehidupan berkelanjutan

⁷⁴ Nina-Maria Gaiser. 2017. *Potret Perubahan FORCLIME*. Jakarta: FORCLIME. hlm 18-19.

⁷⁵Ibid.

masyarakat seperti petani di Kapuas Hulu, GIZ juga memberikan edukasi tentang konsep agroforestri dan cara membuat kompos⁷⁶.

Upaya FORCLIME lainnya yaitu menjaga keanekaragaman hutan, untuk lebih memberikan kesadaran pada masyarakat FORCLIME membantu staf bidang konservasi di KPH di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dalam kegiatan pelatihan perencanaan konservasi partisipatif yang melibatkan masyarakat. Masyarakat diberikan pelatihan tentang pemahaman isi hutan dan penyebab berkurangnya keanekaragaman isi hutan yaitu hewan maupun tanaman tertentu hingga apa yang harus dilakukan. Pemberian pelatihan tersebut dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat seperti setelahnya masyarakat tidak lagi menggunakan jerat untuk menangkap hewan di hutan.

⁷⁷

FORCLIME juga melakukan kerja sama dengan LSM untuk mencapai tujuan. Bekerja sama dengan LSM ataupun swasta dibutuhkan karena terdapat LSM yang lebih berpengalaman untuk menangani suatu permasalahan di daerah tertentu sehingga dapat membantu FORCLIME dalam menjalankan programnya. Seperti halnya untuk mendukung perbaikan tata kelola melalui mediasi penanganan konflik antara masyarakat dan perusahaan kayu GIZ di bawah FORCLIME telah bekerja sama dengan *Working Group on Forest-Land Tenure* (WGT). Masyarakat di Kalimantan banyak yang bergantung kepada sumber daya alam untuk memenuhi kehidupannya sehingga untuk pembangunan ekonomi dibutuhkan kepemilikan lahan yang jelas. Namun, muncul permasalahan tentang kepemilikan lahan karena kurangnya tata kelola hutan dan lahan yang baik sehingga sejak 2010 FORCLIME telah mendukung pemetaan partisipatif di beberapa desa di Kalimantan. GIZ memberikan sosialisasi pemetaan supaya masyarakat mengetahui batas-batas wilayah di daerah

⁷⁶Ibid. Hlm 20.

⁷⁷ Ibid.

mereka dan tahu cara mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut.⁷⁸

Selama FORCLIME bekerja untuk mencapai tujuannya dengan menjalankan berbagai kerangka kerja telah menunjukkan hasil-hasil yang positif. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal program FORCLIME perlu meningkatkan kinerjanya. Saat ini dengan memanfaatkan waktu yang masih tersisa dapat digunakan untuk memberikan kemajuan dalam hasil dari program FORCLIME.⁷⁹

⁷⁸Ibid. Hlm 31-33.

⁷⁹ Ibid.